

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan. Penulis menemukan bahwa: Pemenuhan komitmen agar Izin Mendirikan Bangunan berlaku efektif dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, serta tidak menekankan bahwa pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi, sedangkan, pemenuhan komitmen agar Izin Mendirikan Bangunan berlaku efektif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak IMB diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS paling lama 3 (tiga) hari. Pemenuhan komitmen Izin Operasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah wajib dilakukan oleh pemilik rumah sakit dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sedangkan pemenuhan komitmen Izin Operasional tidak diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang menyebabkan ketidaksinkronan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu: pembuat peraturan perundang-undangan kurang memperhatikan atau tidak melalui pertimbangan landasan yuridis, dan pembuat peraturan perundang-undangan kurang memperhatikan materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Konsekuensi dari ketidaksinkronan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah timbulnya kontradiksi antara peraturan yang lebih rendah, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini menyebabkan ketentuan mengenai jangka waktu pemenuhan komitmen untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Operasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tidak dapat diberlakukan, karena apabila ketentuan tersebut diberlakukan, maka akan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan sebelum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa Pembuat peraturan perundang-undangan dalam membuat sebuah peraturan, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit harus lebih memperhatikan materi muatan yang terdapat dalam peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit juga harus melalui pertimbangan yuridis, sehingga tidak terdapat kontradiksi atau ketidaksinkronan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Saran penulis setelah dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah bahwa perlunya dilakukan suatu pelatihan bagi seorang *legal drafter* yang telah membuat peraturan tersebut sehingga kedepannya *legal drafter* tersebut dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan lebih mempertimbangkan landasan yuridis dan memperhatikan materi muatan pada peraturan lain yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ini juga dapat dilakukan *executive review*, sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, _____, *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, _____, Yogyakarta.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Sarwoto, 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tegoeh Soejono, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Veronica Komalasari, 2002, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grafindo, Jakarta.

JURNAL/MAKALAH:

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, 2019, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, *Jurnal*, Vol. 8 No. 2, Universitas Diponegoro.

Uchaimid Biridlo'i Robby, Wiwin Tarwini, 2019, Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, *Jurnal*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, Universitas Krisnadwipayana.

Wicipto Setiadi, 2009, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal*, Vol. 6 No. 4, Legislasi Indonesia.

SKRIPSI:

Alfina Tahta Alfiana, 2019, Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Tingkat VI Kota Madiun Tahun 2019, *Skripsi*, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.

American Hospital Association, 1974, dalam buku Alamsyah, 2011, dalam Saribulang Sultan, 2016, "Kualitas Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Association of Hospital Care, 1947, dalam buku Alamsyah, 2011, dalam Saribulang Sultan, 2016, "Kualitas Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Esi Agnes Charina Br. Pencawan, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Gl. Tobing Tanjung Morawa, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.

Hardianti, 2017, Kualitas Pelayanan Rawat Inap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dan Umum Di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Wotu Kabupaten Luwu, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Hisyam Afif Al Fawwaz, 2019, Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Wolper dan Pena, 1987, dalam buku Alamsyah, 2011, dalam Saribulang Sultan, 2016, “Kualitas Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

INTERNET:

Deasy Mayasari, 2020, *Arti Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif dalam Dunia Kesehatan*, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/271500/arti-promotif-preventif-kuratif-dan-rehabilitatif-dalam-dunia-kesehatan>, diakses 23 September 2020.

Guru Ekonomi, 2020, Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli, <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/>, diakses 5 Oktober 2020.

Hadijah Alaydrus, 2020, *BKPM: Peringkat EoDB Indonesia 2021 Bisa Naik ke Urutan 60*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200908/9/1288876/bkpm-peringkat-eodb-indonesia-2021-bisa-naik-ke-urutan-60>, diakses 18 September 2020.

Hartono Lapan Suroto, 2019, Pengertian Rumah Sakit Fungsi, Tujuannya, Dan Tipe Rumah Sakit, <https://www.gomarketingstrategic.com/pengertian-rumah-sakit-fungsi-tujuannya-dan-tipe-rumah-sakit/>, diakses 5 Oktober 2020.

Hestanto, _____, *Tinjauan Umum Tentang Perizinan*, <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>, diakses 25 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/izin>, diakses 25 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/rumah%20sakit>, diakses 23 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 5 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>, diakses 16 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sinkron>, diakses 16 September 2020.

Nur Fatimah, 2019, Rumah Sakit, Sejarah, Syarat, Tujuan dan Fungsinya Menurut UU, <https://pelayananpublik.id/2019/07/30/rumah-sakit-sejarah-syarat-tujuan-dan-fungsinya-menurut-uu/#:~:text=Institusi%20bernama%20rumah%20sakit%20pertama,perawat%20yang%20dibiayai%20anggaran%20kerajaan.>, diakses 12 Oktober 2020.

Seputar Pengetahuan, 2016, Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap), <https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses 5 Oktober 2020.

Si Manis, 2018, 14 Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli Terlengkap, <https://www.pelajaran.co.id/2018/10/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses 5 Oktober 2020.

Silontong, 2018, 5 Pengertian Rumah Sakit Menurut Para Ahli Terbaru, UU dan Permenkes, <https://www.silontong.com/2018/05/07/pengertian-rumah-sakit-menurut-para-ahli/#>, diakses 5 Oktober 2020.

The World Bank, _____, Doing Business Measuring Business Regulations, <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses 18 September 2020.

Trading Economics, _____, Ease of Doing Business in Indonesia, <https://tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business>, diakses 18 September 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

LAIN-LAIN

Wawancara pribadi dengan ibu Risma Elisabeth Simanjuntak, S.KM, pegawai pada bagian seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, pada tanggal 23 Februari 2021.